BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kader penggerak masyarakat merupakan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat. Kader penggerak masyarakat berperan dalam merealisasikan program-program pemerintah di tingkat masyarakat umum serta membantu masyarakat mendapatkan fasilitas dan akses di berbagai bidang (Widadi, 2023). Peran kader penggerak masyarakat memiliki urgensi bagi keberlangsungan beragam kebutuhan masyarakat. Diharapkan kader penggerak masyarakat memiliki kemampuan khusus untuk mendampingi masyarakat dalam berbagai kepentingan (Bahri, 2023). Selain itu, kader penggerak masyarakat juga harus memiliki kemampuan responsif dalam mengidentifikasi, mengantisipasi, serta menghadapi beragam permasalahan dan kondisi yang dialami oleh anggota masyarakatnya (Isrofah, 2021). Provinsi Jawa Barat memiliki kader penggerak yang tersebar di setiap kabupaten dan kota. Secara kuantitatif, hal ini merepresentasikan urgensi peran kader penggerak di setiap daerah sebagai salah satu penghubung pemerintah setempat dan masyarakatnya. Kader penggerak masyarakat perlu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan agar terbentuk aksi kolektif dalam menghadapi beragam tantangan di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan modal yang dapat terbentuk di dalam sebuah komunitas atau kelompok masyarakat. Modal yang dimaksud adalah modal sosial.

Modal sosial merupakan kumpulan sumber daya aktual berkaitan dengan jejaring yang langgeng berupa hubungan dan pengakuan yang terlembagakan (Richardson, 1986). Kelompok masyarakat terikat pada tatanan norma sebagai pranata sosial yang telah melembaga (Bourdieu P. , 1986). Selain dari pada itu di dalam sebuah kelompok sosial, anggota akan terhubung satu sama lain berdasarkan nilai, kepentingan, kepercayaan yang koheren.

Setiap kelompok masyarakat dapat mengembangkan modal sosial yang dimiliki untuk bergerak konstruktif (Maulana, 2023). Realitasnya, beragam tantangan dialami oleh para kader penggerak masyarakat untuk menjalankan perannya. Kota Bandung memiliki program bernama MOTEKAR (motivator ketahanan keluarga). Dianggap berjalan efektif, program ini masih mengalami kendala dalam prosesnya. Masih ada keterbatasan kemampuan, pemahaman birokrasi, dan tidak maksimalnya sistem pemberdayaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi para kader penggerak masyarakat (Kapti, Bintari, & Adinda, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat fenomena modal sosial pada kader penggerak masyarakat berdasar pada urgensi peran kader penggerak di masyarakat.

Penelitian ini dilakukan setelah mengadakan kegiatan pengabdian, dimana pada umumnya penelitian dilakukan sebelum kegiatan pengabdian. Hal ini merupakan proses terbaru dengan catatan peneliti dapat mengidentifikasi dan memetakan terlebih dahulu beragam permasalahan di lokasi penelitian dan mengerucutkan poin-poin permasalahan yang perlu digali lebih mendalam. Peneliti bergabung sebagai bagian dari tim pengabdian kepada masyarakat UPI yang didanai oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi di tahun 2023 dengan mengadakan pemberdayaan kepada para kader penggerak perempuan di kecamatan Antapani Kota Bandung di bidang politik, yakni “Pendidikan Politik Berbasis *GEDSI* Bagi Kader Penggerak Perempuan”. Sebelum mengadakan pengabdian, dilakukan penelitian awal terhadap kondisi para kader penggerak perempuan di kecamatan Antapani Kota Bandung. Hasil analisis data awal pada penelitian ini menunjukkan kondisi yang dihadapi oleh mitra terkait ketercapaian masalah bidang sosial humaniora diantaranya:

- 1) ketimpangan angka partisipasi sekolah perempuan
- 2) kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga
- 3) isu kekerasan seksual
- 4) kepedulian anak

5) diskriminasi hukum posisi perempuan.

Kemudian aspek-aspek hambatan lainnya yakni masih kurangnya pemahaman terkait perhatian terhadap penyandang disabilitas (Malihah et al., 2023). Di bidang politik, kecamatan Antapani belum memiliki kapabilitas dalam mengimplementasikan partisipasi politik yang ramah gender, peka terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, dan akses untuk kelompok inklusi sosial. Kegiatan pendidikan politik perempuan berbasis *GEDSI* menjadi tonggak tolak ukur modal sosial mitra penggerak perempuan dalam untuk memiliki kapabilitas kesanggupan (*faculty*), kemampuan (*ability*), kepandaian (*skill*), dan kecakapan (*capacity*) politik sebagai peningkatan pemberdayaan kepercayaan terhadap mitra penggerak perempuan dalam merumuskan kebijakan mengenai kebutuhan, permasalahan, dan solusi dari isu-isu yang dihadapi oleh kaumnya sendiri (Nurbayani, 2019).

Menanggapi masalah tersebut, tim menyelenggarakan kegiatan pengabdian bagi para kader penggerak perempuan mengadakan kegiatan melalui pendidikan politik berbasis *GEDSI* bagi kader penggerak perempuan. Beragam temuan di lapangan menunjukkan bahwa, kader penggerak membutuhkan beragam perangkat dalam menyelesaikan permasalahan melalui kursus dengan konten peristiwa terkini dan membuat keputusan yang informatif serta berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang berkualitas (Malihah et al., 2023). Kader penggerak masyarakat berperan penting di dalam masyarakat dan pembangunan untuk mendukung kesetaraan gender, partisipasi perempuan dalam kebijakan, serta pemberdayaan perempuan secara sosial, ekonomi, dan politik. Kader penggerak masyarakat adalah individu yang aktif dalam mengadvokasi isu-isu perempuan, memberikan pelatihan, dan memobilisasi perempuan dalam berbagai inisiatif dan program (Widiyaningrum, 2020). Aspek *GEDSI* (*Gender Equality, Disability, and Social Inclusion*) dapat menjadi salah satu strategi pendidikan politik perempuan dimana keterlibatan perempuan secara langsung sebagai pihak yang berperan mengambil keputusan publik, dapat menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapabilitas yang mumpuni.

Arindini Ayu Kisvi Rizkia, 2024

REKONSTRUKSI MODAL SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN RESILIENSI KADER PENGGERAK MASYARAKAT BERBASIS GEDSI (GENDER EQUITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION) DI KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pada hakikatnya *GEDSI* adalah proses menganalisis informasi untuk memastikan bahwa manfaat dan sumber daya pembangunan ditargetkan secara efektif dan adil. Setiap dampak negatif dari intervensi pembangunan dapat terjadi pada perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok yang terpinggirkan berhasil diantisipasi dengan baik (Wahyuni, 2022). *GEDSI* dikenal dengan akronim dari *gender equality, disability, and social inclusion*. Namun, dalam penelitian ini peneliti tidak hanya sekedar menyoroiti poin kesetaraan gender, tetapi lebih daripada itu adalah keadilan gender. Sehingga berbeda dengan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya, diksi yang digunakan dalam penelitian ini bukan *gender equality* tetapi *gender equity*.

Konsep keadilan gender berbeda dengan kesetaraan gender, perbedaan ini baik secara diksi maupun makna. Kesetaraan gender atau *gender equality* mengacu pada konsep “kesetaraan” pada hak, kesempatan, akses, dan partisipasi di berbagai bidang kehidupan sosial seperti pendidikan, politik, pekerjaan dan sebagainya (Siscawati et al., 2020). Kesetaraan gender juga mengacu pada konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Funk, 2019). Sementara, menurut *United Nations Educational, Scientific And Cultural Organisation (UNESDOC)* konsep keadilan gender didasari dengan adanya pengakuan mengenai kebutuhan yang berbeda pada setiap individu terkait hak, kewajiban, keuntungan, dan kesempatan (The UNESCO Agenda for Gender Equality, 2019).

Prinsip keadilan gender adalah memberikan akses yang disesuaikan dengan kondisi unik setiap individu atau komunitas, bukan hanya dengan memberikan porsi kebutuhan yang sama saja tetapi menekankan pada prinsip keadilan yang lebih spesifik (Williams, 2024). Kesetaraan memiliki batasan yakni belum melibatkan unsur adil dan sesuai, hanya fokus pada pemberian akses yang sama. Sehingga konsep penyetaraan tidak cukup untuk memberikan hak, kesempatan, akses, dan partisipasi yang adil pada setiap individu dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Oleh karena itu, peneliti memilih menggali permasalahan dari perspektif *gender equity* atau

keadilan gender.

Menurut dataset Provinsi Jawa Barat, kecamatan Antapani memiliki 174 kader umum sejak tahun 2020. Pada kegiatan pengabdian, peneliti mengamati ada fenomena unik dimana kader penggerak masyarakat yang masif berperan adalah kader laki-laki. Kader penggerak yang biasanya lebih umum beranggotakan perempuan, tetapi kecamatan Antapani memiliki kader-kader laki-laki yang masif bergerak di lapangan. Hal ini menjadi salah satu latar belakang untuk meneliti lebih jauh fenomena tersebut. Penelitian ini lebih lanjut akan mengungkap secara fenomenologis modal sosial yang ada pada para kader penggerak masyarakat. Urgensitas kajian *GEDSI* akan terdeskripsikan lebih jelas melalui rekonstruksi yang dapat dikembangkan pada modal yang sudah dimiliki sehingga para kader baik laki-laki maupun perempuan memiliki resiliensi seimbang dalam menjalankan perannya di masyarakat. Pada tahap observasi dalam kegiatan pengabdian, perbedaan kapasitas dan kebutuhan antara kader perempuan dan laki-laki dalam bergerak di lapangan berpengaruh terhadap keberhasilan dan efektifitas peran di masyarakat (Malihah et al., 2023). Oleh karena itu, modal sosial yang akan digali lebih jauh bukan hanya pada aspek kesetaraan gender saja tetapi lebih kepada perspektif keadilan gender. Peneliti akan melibatkan konteks disabilitas dan inklusi sosial dengan urgensi didasarkan pada pemetaan permasalahan yang masih dialami oleh para kader dalam menghadapi isu tersebut.

Kecamatan Antapani telah menunjukkan komitmennya dalam memajukan peran perempuan melalui kader penggerak yang partisipatif. Meskipun begitu, perlu diakui bahwa saat ini masih terdapat kekurangan dalam hal implementasinya (Malihah et al., 2023). Berdasarkan hasil kegiatan tim pengabdian termasuk peneliti di kecamatan Antapani, terdapat temuan kecenderungan dominasi kader laki-laki yang lebih aktif berperan dengan beragam strategi. Hal ini nampak pada kader penggerak di 3 dari 4 wilayah kecamatan Antapani. Hal ini mendorong peneliti untuk mengungkap lebih mendalam mengenai rekonstruksi modal sosial pada kader penggerak masyarakat terhadap terbentuknya resiliensi yang seimbang antara kader

Arindini Ayu Kisvi Rizkia, 2024

REKONSTRUKSI MODAL SOSIAL TERHADAP PEMBENTUKAN RESILIENSI KADER PENGGERAK MASYARAKAT BERBASIS GEDSI (GENDER EQUITY, DISABILITY, AND SOCIAL INCLUSION) DI KECAMATAN ANTAPANI KOTA BANDUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

laki-laki dan perempuan di kecamatan Antapani menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi.

Dalam konteks ini, modal sosial merupakan faktor kunci yang memengaruhi efektivitas kader penggerak masyarakat dalam mencapai tujuan mereka. Modal sosial mencakup jaringan sosial, norma sosial, kepercayaan, dan kerjasama antarindividu dalam masyarakat (Bourdieu P. , 1986). Kader penggerak masyarakat yang memiliki modal sosial yang kuat dapat lebih efektif dalam mengorganisir, memobilisasi dukungan, dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Namun, modal sosial kader penggerak masyarakat dapat terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Kyle, 2019). Oleh karena itu, penelitian tentang rekonstruksi modal sosial pada kader penggerak masyarakat menjadi sebuah urgensi. Rekonstruksi modal sosial mengacu pada upaya untuk memahami bagaimana kader penggerak masyarakat menghadapi perubahan dalam lingkungan sosial mereka dan bagaimana mereka membangun kembali atau memperkuat modal sosial mereka untuk mencapai tujuan mereka.

Peneliti akan menganalisis lebih jauh mengenai modal sosial yang dimiliki kader penggerak masyarakat berbasis GEDSI (*Gender Equity, Disability, and Social Inclusion*). Bagaimana kader penggerak masyarakat dapat memperkuat modal sosial yang mereka miliki sehingga muncul rekonstruksi modal sosial berbasis keadilan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Serta dampaknya terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat yang diperlukan baik bagi kader laki-laki maupun kader perempuan di kecamatan Antapani, kota Bandung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti menentukan judul penelitian: **“Rekonstruksi Modal Sosial Terhadap Pembentukan Resiliensi Kader Penggerak Masyarakat Berbasis GEDSI (*Gender Equity, Disability, And Social Inclusion*) Di Kecamatan Antapani Kota Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah umum dalam penelitian ini adalah bagaimana rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion)* di kecamatan Antapani?

Berikut rumusan masalah khusus pada penelitian ini:

1. Bagaimana gambaran modal sosial kader penggerak masyarakat di kecamatan Antapani?
2. Bagaimana bentuk rekonstruksi modal sosial kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion* di kecamatan Antapani?
3. Bagaimana dampak rekonstruksi modal sosial berbasis *gender equity, disability, and social inclusion* terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat di kecamatan Antapani?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengungkap rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion)* di kecamatan Antapani kota bandung. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi secara analitis gambaran modal sosial kader penggerak masyarakat di kecamatan Antapani.
2. Menganalisis bentuk rekonstruksi modal sosial kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion* di kecamatan Antapani.
3. Menganalisis dampak rekonstruksi modal sosial berbasis *gender equity, disability, and social inclusion* terhadap pembentukan resiliensi kader

penggerak masyarakat di kecamatan Antapani.

1.4 Manfaat Penelitian

Ditinjau dari berbagai aspek, penelitian ini memiliki kebermanfaatan sebagai bagian dari pengembangan pengetahuan. Secara teoretis, hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman di lingkungan pendidikan tinggi maupun masyarakat umum terkait modal sosial yang dimiliki oleh kader penggerak masyarakat. Secara kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi bagi lembaga pemerintah terkait isu atau konsep peran kader penggerak masyarakat berbasis pendekatan *gender equity, disability, and social inclusion*. Dalam aspek aksi sosial, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi data pendorong gerakan sosial lanjutan di lingkungan pendidikan tinggi maupun bagi kelompok masyarakat, terkait dengan peran kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion*.

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti yakni mampu menjadikan peneliti lebih mendalami berbagai konsep tentang fenomena ini. Selain itu, melalui penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat luas tentang keterlibatan peran kader penggerak di masyarakat. Bagi program studi magister pendidikan sosiologi, hasil penelitian ini menambah suatu kajian tentang rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *GEDSI (Gender Equity, Disability, and Social Inclusion)*.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Sebagai langkah untuk memberikan kemudahan penyusunan penelitian ini bagi berbagai pihak yang terkait maka penelitian ini disajikan dalam lima bab yang disusun berdasarkan penulisan sebagai berikut :

1.5.1 BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis sebagai dasar utama pada penelitian ini.

1.5.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti menguraikan dokumen- dokumen atau data-data yang berkaitan dengan fokus pada penelitian ini mulai dari kerangka berfikir serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.

1.5.3 BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data serta tahapan yang di gunakan dalam penelitian mengenai rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion*.

1.5.4 BAB IV TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti memaparkan temuan penelitian yang telah terkumpul berdasarkan metode penelitian yang digunakan mengenai rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion*.

1.5.5 BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil analisis data yang telah terkumpul yaitu menganalisis rekonstruksi modal sosial terhadap pembentukan resiliensi kader penggerak masyarakat berbasis *gender equity, disability, and social inclusion*.

1.5.6 BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini peneliti memberikan simpulan, implikasi dan rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi.